

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA
BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Alex Fernando
130810017**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA
BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Alex Fernando
130810017**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA
BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Alex Fernando
130810017**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam,
Yang membuat pernyataan,

Alex Fernando
130810017

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA
BATAM**

**Oleh
Alex Fernando
130810017**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 14 Februari 2017

**Baru Harahap, S.E., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Batam. Data yang akan diolah pada penelitian ini berupa data sekunder dan penelitian ini menggunakan penelitian metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah laporan pendapatan daerah kota Batam dari tahun 2006 sampai tahun 2015 dan juga berupa sampel yang diambil karena sampel yang pada penelitian ini bersifat sampel jenuh yaitu mengambil seluruh populasi yang ada. Penelitian ini mengambil pajak hotel dan pajak restoran sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah (PAD) kota Batam sebagai variabel dependen. Pajak hotel dan pajak restoran dijadikan sebagai variabel independen pada penelitian ini karena kota Batam banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun dari luar negara, dengan banyak datang wisatawan secara langsung dapat mempengaruhi penghasilan hotel dan restoran, dan juga mempengaruhi total pajak yang akan dibayar hotel dan restoran kepada pemerintah daerah kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Batam dengan nilai t hitung $6.445 > t$ tabel 1.895 dan signifikansi $0.000 < 0.05$, secara parsial pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Batam dengan nilai t hitung $-1.880 < t$ tabel 1.895 dan signifikansi $0.102 > 0.05$, dan secara simultan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Batam dengan nilai f hitung $551.505 > f$ tabel 4.74 dan signifikansi $0.000 < 0.05$. Pada uji koefisien determinasi, nilai R square, menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran sebesar 99,4%, sedangkan sisanya sebesar 0,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel, Pajak Restoran

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the contribution of hotel and restaurant tax on revenue (PAD) Batam city. The data will be processed in this study of secondary data and this study using research methods kuantitatif. The population in the study area is the income statement Batam city from 2006 until 2015 and also in the form of samples taken as samples in this study are saturated sample that is taking the whole population. This research took the hotel tax and restaurant tax as an independent variable and revenue (PAD) as a variable dependen Batam city. Taxes hotel and restaurant taxes used as a variable of independently in this study because the Batam city frequented by tourists, both domestic and from outside the country, with many coming travelers can directly affect the income of hotels and restaurants, and also affects the total taxes that would be paid for the hotel and restaurant to Batam city government. The results showed a partial effect on the hotel tax revenue the city area of Batam with 6445 t count > t table 1.895 and 0.000 significance of <0.05, partially the restaurant tax has no effect on revenue in Batam with a value of -1 880 t <t table 1895 and 0102 sigfikansi > 0.05, and simultaneously hotel tax and restaurant tax effect on income of native city of Batam with a value of 551 505 f count > f table and sigfikansi 4.74 0.000 > 0.05. In the test the coefficient of determination, R square value, indicating that the hotel tax and restaurant tax of 99.4%, while the remaining 0.6% is influenced by other variables that are not included in revenue.

Keywords: Local Government Revenue (PAD), Hotel Tax, Restaurant Tax

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si., Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
3. Bapak Baru Harahap, S.E., M.Ak. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Semua dosen dan staff pengajar di Universitas Putera Batam yang telah mendidik, mengajar dan memberi dorongan kepada penulis hingga penulis dapat mengikuti proses perkuliahan.
5. Orang tua yang selalu memberikan nasihat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan saran dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan serta dalam masa penyusunan skripsi ini.

7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam,

Alex Fernando

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	4
HALAMAN PENGESAHAN.....	5
ABSTRAK	6
<i>ABSTRACT</i>	7
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI.....	10I
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR TABEL	14
DAFTAR RUMUS	15
DAFTAR LAMPIRAN.....	15
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatas Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
<u>BAB II TINJUAN PUSTAKA</u>	10
2.1 Teori Dasar	10
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2.1.2 Dana Perimbangan	13
2.1.3 Pajak	13
2.1.4 Pajak Hotel dan Restoran	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Penelitian	31
2.4 Hipotesis	32
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	33

3.1 Desain Penelitian	33
3.2 Operasioanl Variabel	34
3.2.1 Variabel Bebas (Independent Variable)	34
3.2.2 Variabel Terikat (Dependent Variable).....	35
3.3 Populasi dan Sampel	35
3.3.1 Populasi	35
3.3.2 Sampel	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Metode Analisis Data	37
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	37
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	38
3.5.2.1 Uji Normalitas	38
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas	38
3.5.2.3 Uji Autokolerasi	39
3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas	40
3.5.3 Analisis Linear Berganda	40
3.5.4 Uji Hipotesis	41
3.5.4.1 Uji t (Uji Parsial)	42
3.5.4.2 Uji f (Uji Simultan)	43
3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	45
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian	47
3.6.1 Lokasi Penelitian	47
3.6.2 Jadwal Penelitian	47
<u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	48
4.1 Deskripsi Data	48
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif	52
4.2.2 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD	53
4.2.3 Hasil Uji Normalitas.....	61
4.2.4 Hasil Uji Multikolinearitas	64
4.2.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	65

4.2.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	65
4.2.7 Hasil Uji Analisis Linear Berganda.....	67
4.2.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²).....	68
4.2.9 Hasil Uji Regrasi Secara Bersama-sama atau Simultan (Uji F).....	69
4.2.10 Hasil Uji Regrasi Secara Parsial (Uji T).....	70
4.3 Pembahasan	72
<u>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</u>	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 1.1 Letak geografi kota Batam</u>	6
<u>Gambar 2.1 Kerangka Penelitian</u>	31
<u>Gambar 4.1 Grafik Normal <i>Probability Plot</i></u>	62
<u>Gambar 4.2 Kurva Normalitas (Histogram)</u>	63
<u>Gambar 4.1 Grafik Plot Uji Heteroskedastisitas</u>	66

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu</u>	26
<u>Tabel 3.1 Persen Kontribusi</u>	46
<u>Tabel 3.2 Jadwal Penelitian</u>	46
<u>Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Batam</u> <u>Tahun 2006-2015</u>	49
<u>Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Batam</u> <u>Tahun 2006-2015</u>	50
<u>Tabel 4.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam</u> <u>Tahun 2006-2015</u>	51
<u>Tabel 4.4 Hasil Uji Analisis Deskriptif pada Variabel</u>	53
<u>Tabel 4.5 Kontribusi pajak hotel terhadap PAD</u>	55
<u>Tabel 4.6 Kontribusi pajak restoran terhadap PAD</u>	57
<u>Tabel 4.7 Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD</u>	59
<u>Tabel 4.8 Hasil uji normalitas dengan metode <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i></u>	62
<u>Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas</u>	64
<u>Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi</u>	65
<u>Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda</u>	67
<u>Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi</u>	68
<u>Tabel 4.13 Hasil Uji F</u>	70
<u>Tabel 4.14 Hasil Uji T</u>	71

DAFTAR RUMUS

<u>Rumus 3.1 Rumus Uji Multikolinearitas</u>	38
<u>Rumus 3.2 Rumus Regresi Linear Berganda</u>	40
<u>Rumus 3.3 Rumus Uji T (parsial)</u>	42
<u>Rumus 3.4 Rumus Uji F (Simultan)</u>	44
<u>Rumus 3.5 Rumus Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD</u>	45
<u>Rumus 3.6 Rumus Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD</u>	45
<u>Rumus 3.7 Rumus Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD</u>	46

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran I Tabulasi Data</u>	L.1
<u>Lampiran II . Hasil Uji Penelitian SPSS Versi 21</u>	L.2
<u>Lampiran III Tabel T</u>	L.3
<u>Lampiran IV Tabel F</u>	L.4

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia merupakan salah satu negara agraris di Asia Tenggara. Indonesia berupa gabungan dari 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua serta dengan ribuan pulau kecil lain. Indonesia bisa dikatakan negara yang memiliki lahan atau tanah yang sangat besar di Asia Tenggara, tetapi menjadi negara besar juga membawa kelemahan yaitu pemerintah pusat tidak dapat melakukan perkembangan dan pengendalian daerah-daerah secara langsung dan pemerintah pusat juga tidak mampu melakukan pemerintahan sekaligus untuk seluruh daerah di Indonesia. Dengan itu, Indonesia menganut sistem pemerintah desentralisasi. Menurut UU NO.32 tahun 2004, sistem desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan sistem pemerintahan ini, pemerintah-pemerintah daerah yang diberikan hak untuk melakukan pengendali daerah masing-masing, harus mencari pendapatan daerah atau modal untuk melakukan perkembangan daerah masing-masing. Salah satu pendapatan untuk dijadikan modal pembangunan daerah adalah pajak (Muljono, 2008: 3).

Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan

perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional (Muljono, 2008: 3). Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dan daerah lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya (Supramono, 2010: 5).

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antara lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat yang sehat antar daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi serta

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendorong timbulnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib memberikan pembinaan misalnya dengan pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, pengawasan, bimbingan, pelatihan dan evaluasi. Disamping itu Pemerintah juga wajib memberikan fasilitas yang berupa kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD).

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:15) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Halim (2004:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama

PAD. Sumber-sumber Pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah itu sendiri terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Pendapatan daerah lain yang sah

Pada sumber pendanaan diatas, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Tony Marsyahrul (2003:98) “Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBN)”.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu dari pajak daerah. Dari data diatas, dengan adanya pajak Hotel dan Restoran ternyata memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah dan didukung dengan kondisi Kota Batam sebagai kota

pariwisata. Selain memberikan sumbangan PAD yang besar, hotel dan restoran juga mampu membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Batam.

Kota Batam memiliki Hotel dan Restoran yang lumayan banyak. Menurut DISPENDA kota Batam, hotel yang ada di Kota Batam mencapai 178 hotel yaitu 1 hotel bintang lima , 42 hotel bintang empat dan tiga , dan sisanya hotel bintang dua dan satu. Sedangkan restoran yang ada di Kota Batam mencapai 307 restoran dan itu hanya hotel dan restoran yang sudah tercatat atau lapor diri pada kantor pajak (data tersebut didapatkan dari website DISPENDA kota Batam www.dispenda.batamkota.go.id) . Perkembangan perhotelan dan restoran di Kota Batam bisa dikata pesat dikarenakan Kota Batam merupakan kota pariwisata dan tempat yang strategis. Kota Batam dikatakan kota pariwisata karena di seluruh Pulau Sumatera, yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah Kota Batam. Menurut laporan dari Dinas Pariwisata Provinsi Kepri yang tercatat pada tahun 2015, total wisatawan mencapai 1.514.119 wisatawan dan sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 1.5 juta wisatawan. Dan Kota Batam dikatakan strategis karena letak kota Batam dekat dengan negara Singapura & Malaysia dan merupakan salah satu gerbang keluar masuk ke negara Australia sehingga banyak mendatangkan orang-orang asing.



Gambar 1.1 Letak geografi kota Batam

Dan letak strategis ini juga mendorong perkembangan perhotelan dan restoran terutama letaknya dengan Singapura karena sebagian besar wisatawan yang datang ke Kota Batam adalah warga negara Singapura. Dan bukan di segi pariwisata saja, Singapura juga membantu dalam perkembangan di segi perekonomian dan teknologi.

Usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Kondisi permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak sama pada masing-masing daerah, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk di dalamnya pajak Hotel dan Restoran maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui kontribusi pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Pemerintah Kota Batam dan apakah ada faktor yang

menghambat pengelolaan pajak Hotel dan Restoran serta upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Batam.

1.2 Identifikasi Masalah

Kota Batam memiliki jumlah wisatawan yang banyak dan hal ini sangat mempengaruhi terhadap pendapatan hotel dan restoran, dan itu berarti pajak yang dibayarkan hotel dan restoran kepada Dinas Kepajakan akan bertambah. Dengan ini, dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah berapa besaran pajak hotel dan restoran yang diterima oleh pemerintah Kota Batam dan adakah faktor penghambat dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran.

1.3 Pembatas Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus dipecahkan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap mengarah sesuai judul, maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam pembahasan ini penulis akan menbataskan pembahasan penelitian yaitu pajak hotel dan pajak restoran untuk mengetahui seberapa besar nilai kontribusinya terhadap perndapatan asli daerah (PAD) kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2006 sampai tahun 2015?
2. Apakah ada pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2006 sampai tahun 2015?
3. Apakah ada pengaruh kontribusi pajak hotel dan pajak restoran secara simultan terhadap Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2006 sampai tahun 2015?
4. Apakah ada faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran tahun 2006 sampai tahun 2015 dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran dalam tahun 2006 sampai tahun 2015?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batam periode tahun anggaran 2006-2015.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batam periode tahun anggaran 2006-2015.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah

Kota Batam tahun 2006-2015.

4. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batam dalam proses pengelolaan pajak Hotel dan Restoran dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan pajak Hotel dan Restoran.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Manfaat yang diharapkan dapat dicapai adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota Batam

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Batam dalam evaluasi untuk mengembangkan pajak hotel dan restoran kota Batam.

2. Bagi Universitas Putra Batam

Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan Universitas Sanata Dharma dan sebagai tolak ukur bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak hotel dan restoran.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang di dapat mengenai pajak hotel dan restoran serta menambah pengetahuan bagi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber PAD tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, Terdiri atas :

a. Hasil pajak daerah

- Pajak Propinsi/Daerah Tingkat I
 - Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- Pajak Kabupaten/ Daerah Tingkat II
 - Pajak restoran
 - Pajak hiburan
 - Pajak reklame
 - Pajak penerangan jalan
 - Pajak pengambilan bahan galian Golongan C
 - Pajak parkir
 - Pajak hotel

2. Hasil retribusi daerah.

- Retribusi jasa umum
 - Pelayanan kesehatan
 - Pelayanan persampahan/kebersihan
 - Penggantian biaya cetak kartutanda penduduk/akta catatan sipil
 - Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
 - Pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - Pelayanan pasar
 - Pengujian kendaraan bermotor
 - Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - Penggantian biaya cetak peta
 - Pengujian kapal perikanan
- Retribusi jasa usaha

- Pemakaian kekayaan daerah
 - Pasar grosir dan/atau pertokoan
 - Tempat pelelangan
 - Terminal
 - Tempat khusus parkir
 - Tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 - Penyedotan kakus
 - Rumah potong hewan
 - Pelayanan pelabuhan kapal
 - Tempat rekreasi dan olahraga
 - Penyeberangan di atas air
 - Pengelolaan limbah cair
 - Penjualan produksi usaha daerah
 - Retribusi perizinan tertentu
 - Izin mendirikan bangunan
 - Izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - Izin gangguan
 - Izin trayek
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- Pembagian laba
 - Deviden
 - Dan penjualan saham milik daerah

4. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.

- Hasil penjualan asset tetap daerah
- Jasa giro
- hibah

2.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dan jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Terdiri atas :

1. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari Sumber Daya Alam
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

2.1.3 Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012,2) Pajak memiliki maksud yang berbeda-beda berikut ini merupakan beberapa definisi:

- Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro (1992)

“Pajak adalah iuran Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”
- Menurut Sommerfeld Ray M (2002)

“Pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek social.”
- Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”⁰
- Menurut Undang Undang (UU RI No.28/2007)

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b. Teori Pengenaan Pajak

Menurut Soemarso (2007:3-4), teori-teori pengenaan pajak ada 5 macam yaitu:

- Teori Bakti

Mengatakan bahwa pajak merupakan hak dari negara. Salah satu hak negara adalah memungut pajak. Di lain pihak, pajak merupakan tanda bukti warga kepada negaranya. Dasar hukum dari pajak menurut teori ini adalah hubungan rakyat dan negara.

- Teori Asuransi

Pajak dalam teori ini disamakan dengan premi asuransi yang harus dibayar oleh rakyat, untuk memperoleh perlindungan dari negara.

- Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.

- Teori Gaya Pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa pembebanan pajak, sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan gaya pikul seseorang.

- Teori Gaya Beli

Dikemukakan bahwa pajak dipungut atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pajak pada hakikatnya adalah memungut gaya beli dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kedalam masyarakat.

c. Pengertian Wajib Pajak

Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2010:1-2), fungsi-fungsi ada 2 macam yaitu:

- Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Misalnya dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

- Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang mewah.

e. Syarat Pemungutan Pajak

- Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

- Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

f. Jenis Dan Pembagian Pajak

- Menurut golongannya

1. Pajak langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : PPh

2. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : PPN

- Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif

Pajak yang berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. (sesuai daya pikul Wajib Pajak). Contoh : PPh

- 2) Pajak objektif

Pajak yang didasarkan pada objeknya (suatu keadaan atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya wajib membayar pajak), tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPN dan PPnBM

- Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM dan Bea Materai.

2) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

g. Cara Pemungutan Pajak

- Stelsel Pajak

1) Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3) Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

- Asas Pemungutan Pajak

1) Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib Pajak

yang bertempat tinggal di wilayahnya. Baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berlaku untuk WP dalam negeri.

2) Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

3) Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

- Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (pemerintah).
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

h. Tarif Pajak

- Proporsional (sebanding)

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : pengenaan pajak untuk PPN sebesar 10%

- Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : tarif PPH

- Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

- Tetap

Ditetapkan tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh : tarif Bea Materai.

2.1.4 Pajak Hotel dan Restoran

a. Pengertian

Menurut Thamrin Simanjuntak (2007:96), “Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pembayaran pelayanan di Hotel”. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran

Menurut Thamrin Simanjuntak (2007:96) “Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pembayaran pelayanan restoran”. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

b. Objek Pajak

Objek pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran pelayanan di Hotel atau Restoran, meliputi :

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

- 2) Fasilitas pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- 5) Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya, termasuk yang dibawa pulang.

c. Setoran masa pajak Hotel dan Restoran

- 1) Mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah
- 2) Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
- 3) Wajib Pajak membayar Pajak Hotel dan Restoran ke Kas Daerah
- 4) Melaporkan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah yang bersangkutan pada seksi penagihan dengan melampirkan bukti penerimaan bulanan.

d. Tarif Pajak

Tarif pajak Hotel dan Restoran ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam sebesar 10%

e. Cara menghitung Pajak

Menurut Thamrin Simanjuntak (2007:96), “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang dilakukan kepada hotel atau restoran”. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Cara menghitung pajak yaitu Dasar Pengenaan Pajak \times 10%

f. Wajib Daftar Usaha

Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulai kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD, kecuali ditetapkan lain oleh Gubernur Kepala Daerah.
- 2) SPTPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani Wajib Pajak atau kuasanya.
- 3) SPTPD harus disampaikan kepada dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

h. Pembayaran Pajak

- 1) Pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak.
- 2) Pembayaran dilakukan pada Kantor Kas Daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

N O	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITAN	TAH UN PENE ILITI AN	HASIL PENELITIAN
1	I Dewa Gede Agung Dwi Temaja, I D.G Dharma Suputra	“Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar”	Tahun 2008- 2012	Retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh positif pada pendapatan asli daerah kabupaten Gianyar.
2	Joost Rumampuk, Jeane Rumawir, Jein Mantiri	“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon”	Tahun 2008- 2012	Perkembangan dari tahun 2008-2012, perbandingan anggaran dan realisasi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

				menunjukkan keadaan yang kurang baik karena pada umumnya mengalami penurunan.
3	Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja	“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013”	Tahun 2010-2013	Hasil dari penelitian adalah ketiga variabel tersebut secara parsial, ada pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.
4	Eka Arif Rustanto, Siti Nurlaela, Anita Wijayanti	“Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta”	Tahun 2009-2012	Hasil penelitian adalah bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.

5	Anita Candrasari, Sutjipto Ngumar	“Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2010- 2014	Hasil bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran dari tahun 2010-2014 mengalami penurunan tetapi pencapaian kontribusi sudah cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan pendapatan daerah.
6	Ni Made Marita dan Ketut Alit Suardana	“Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar”	Tahun 2009- 2013	Penerimaan Pajak Daerah terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa, secara absolute dari pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan

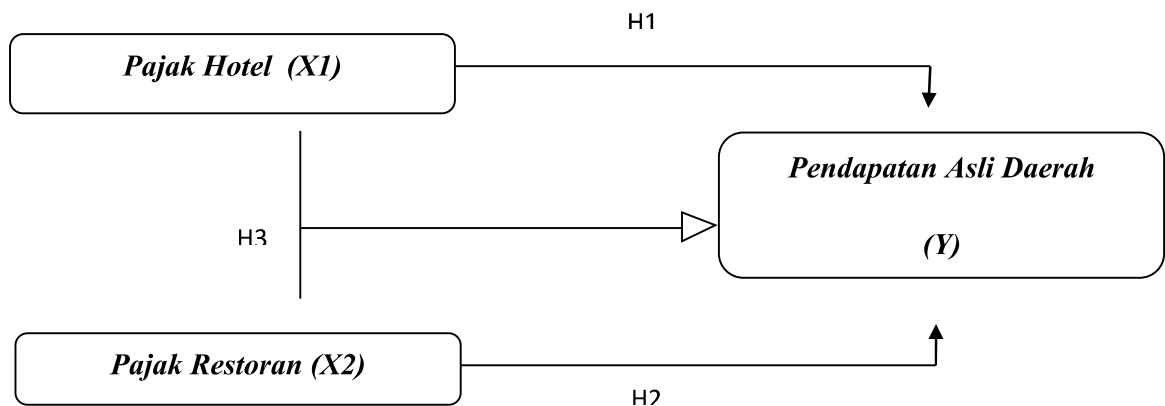
				<p>jalan, secara efektif jumlah rupiah realisasi penerimaan meningkat setiap tahun ke kas daerah Kota Denpasar, akan tetapi secara persentase realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah terjadi penurunan dari tahun 2009-2013.</p>
7	Agriani Lombogia	<p>“Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan”</p>	Tahun 2012- 2015	<p>Sesuai dengan analisis kontribusi dapat diketahui kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah di</p>

				tahun 2012 sebesar 0.023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%.
8	Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie	“Analisi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin”	Tahun 2007-2014	Bahwasanya secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan ppju berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin, sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
9	Fitriana	“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di	Tahun 2002-2012	Hasil penelitian adalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di kota

		Kota Bontang”		Bontang.
10	Reza Arditia	“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”	Tahun 2007-2011	Hasil penelitiannya adalah bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya berada dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang.

2.3 Kerangka Penelitian

Di bawah ini merupakan gambar yang mengenai hubungan antar variabel .



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Keterangan:

—————→ : Pengaruh Pajak Hotel (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah(Y) ,
pengaruh Pajak Restoran (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah(Y).

—————▷ :Pengaruh Pajak Hotel(X1) dan Pajak Restoran (X2) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (Y).

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan yaitu

H₁ = ada pengaruh perkembangan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota
Batam pada tahun 2006 sampai 2015.

H₂ = ada pengaruh perkembangan kontribusi pajak restoran terhadap PAD kota
Batam pada tahun 2006 sampai 2015.

H₃ = ada pengaruh perkembangan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap
PAD kota Batam pada tahun 2006 sampai 2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:5) metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis.

Menurut Martono (2011:131) desain penelitian adalah penjelasan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian. Penyusunan desain penelitian merupakan tahap awal dan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif karena objek yang akan dijadikan bahan penelitian ini bersifat laporan keuangan . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) kota Batam dan apakah ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Batam.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2009:58) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

3.2.1 Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hotel (X1) dan pajak restoran (X2). Menurut Thamrin Simanjuntak (2007:96), definisi pajak hotel dan pajak restoran yaitu sebagai berikut:

- Pajak Hotel (X1) adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran di mana obyek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- Pajak Restoran (X2) didefinisikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

3.2.2 Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada disuatu daerah berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku di mana PAD sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini populasinya adalah laporan Pendapatan Daerah Kota Batam.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2008:116) “sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dan sampel penelitian berupa sampel jenuh yang berarti mengambil semua populasi yang ada, yaitu laporan Pendapatan Daerah Kota Batam selama 60 bulan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008:62) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dari Dinas Pendapatan Daerah(PAD). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Instrumen yang digunakan adalah pedoman dokumentasi, untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari sumber tertulis. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Maka, metode dokumentasi dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, dsb. (Arikunto, 2005:135)..

Data-data atau dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Batam tentang pajak hotel dan pajak restoran.
2. Data Pendapatan Asli Daerah kota Batam dari tahun 2011-2015.
3. Data realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran kota batam dari tahun 2011-2015.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan/dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Priyatno (2012:38) analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistic data berupa *mean*, *sum*, stander deviasi, *variance*, *range*, dan lain-lain, dan untuk mengukur distribusi data apakah normal atau tidak dengan ukuran *skewness* dan kurtosis.

Dalam penelitian ini, pengolahan data dengan menggunakan aplikasi program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) versi 21 *for windows*. Pengujian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel profitabilitas, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Wibowo (2012:61) uji normalitas ini dilakukan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng, *bell-shaped curve*. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Histogram Regression Residual yang sudah distandarkan, analisis Chi Square dan juga menggunakan Nilai Kolmogorow-Smirnov. Kurva nilai Residual terstandarisasi dikatakan normal jika: Nilai Kolmogorov-Smirnov $Z < Z_{\text{tabel}}$; atau menggunakan Nilai Probability Sig (2 tailed) $> \alpha$; sig . 0,05

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji asumsi tentang multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas yang lainnya. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus korelasi Product Moment sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Rumus 3.1 Rumus Uji Multikolinearitas

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara x dan y

N = Jumlah responden

xy = Total perkalian antara x dan y

x = Jumlah skor butir x

y = Jumlah skor butir y

x^2 = Jumlah kuadrat x

y^2 = Jumlah kuadrat y

Berdasarkan metode *Varince Inflation Factor* (VIF)) dan *Tolerance* (TOL). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 (sepuluh) maka terjadi multikolinearitas dan jika nilai *Tolerance* (TOL) lebih kecil dari pada 0.1 atau 10%, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Wibowo (2012:101) menyatakan uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, cross section atau time-series. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan residualnya, adapun dasar untuk menganalisisnya adalah :

- a) Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Wibowo (2012:126) analisi regresi linear berganda pada dasarnya merupakan analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang hamper sama dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini memiliki perbedaan dalam hal jumlah variabel independen yang merupakan variabel penjelas jumlahnya lebih dari satu buah.

Regresi linear berganda di notasikan sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y' = variabel dependen (Struktur modal)

**Rumus 3.2 Rumus
Regresi Linear
Berganda**

- a = nilai konstanta
- b = nilai koefisien regresi
- x₁ = nilai independen pertama
- x₂ = nilai independen kedua
- x₃ = nilai independen ketiga

3.5.4 Uji Rancangan Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi) (Priyatno, 2008:10-11).

Pengujian hipotesis yang dilakukan akan memperlihatkan hal-hal sebagai berikut (Sugiyono, 2012:125) :

- Uji hipotesis merupakan uji dengan menggunakan data sampel
- Uji menghasilkan keputusan menolak H₀ atau sebaliknya menerima H₀
- Nilai uji dapat dilihat dengan menggunakan nilai F atau nilai t hitung maupun nilai Sig
- Pengambilan kesimpulan dapat pula dilakukan dengan melihat gambar atau kurva, untuk melihat daerah tolak dan daerah terima suatu hipotesis nul

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (uji parsial), uji F (simultan), dan uji koefisien determinasi (R²).

3.5.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Menurut Priyatno (2008:83) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan:

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_a : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Dengan menggunakan rumus t hitung

$$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{s_{b_i}}$$

Rumus 3.3 Rumus Uji T (parsial)

Keterangan:

b_i = Koefisien regresi variabel i

s_{b_i} = Standar error variabel i

3. Kriteria pengujiannya adalah:

- a. Jika $\text{sig} \leq \alpha = 0,05$. Artinya H_0 ditolak, H_a diterima yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

- b. Jika $\text{sig} > \alpha = 0,05$. Artinya H_0 diterima, H_a ditolak menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tetap.
4. Atau dengan membandingkan t hitung dengan t tabel:
- a. Jika t hitung $>$ t tabel. Artinya H_0 ditolak, H_a diterima yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tetap.
 - b. Jika t hitung $<$ t tabel. Artinya H_0 diterima, H_a ditolak yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tetap.

3.5.4.2 Uji F (Uji Simultan)

Menurut Priyatno (2008:81) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

Cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan:

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat

2. Dengan menggunakan rumus F hitung

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

**Rumus 3.4 Rumus
Uji F (Simultan)**

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data atau kasus

k = Jumlah variabel independen

3. Kriteria pengujiannya adalah:

- a. Jika $\text{sig} \leq \alpha = 0,05$. Artinya H_0 ditolak, H_a diterima yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Jika $\text{sig} > \alpha = 0,05$. Artinya H_0 diterima, H_a ditolak menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel tetap.

4. Atau dengan membandingkan f hitung dengan f tabel:

- a. Jika $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$. Artinya H_0 ditolak, H_a diterima yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel tetap.
- b. Jika $f \text{ hitung} < f \text{ tabel}$. Artinya H_0 diterima, H_a ditolak yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel tetap.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Priyatno (2008:79) analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X₁, X₂,...X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

3.5.5 Kontribusi Pajak

Untuk menghitung kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{jumlah pajak hotel}}{\text{pendapatan asli daerah}}$$

Rumus 3.5 Rumus kontribusi Pajak hotel terhadap PAD

Dan menghitung kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{jumlah penerimaan pajak restoran}}{\text{pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Rumus 3.6 Rumus kontribusi pajak restoran terhadap PAD

Kemudian untuk menghitung kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran}}{\text{pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Rumus 3.7 Rumus kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD

Menurut para ahli, kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Tabel kontribusi pajak yang akan digunakan berasal dari Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991, sebagai berikut:

Persentase (%)	Kriteria
0 – 10	Kurang
11 – 30	Sedang
31 – 50	Baik
Diatas 50	Sangat baik

Tabel 3.1 Persen Kontribusi

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang beralamat Batam Center Jl. Engku Putri No.17, Tlk. Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan mulai dari bulan September 2016 sampai Januari 2017 yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

No.	Tahapan Penelitian	Tahun/ Bulan/ Minggu Ke																			
		Sep				Oct				Nov				Des				Jan			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Bab I			■	■	■	■														
3	Bab II					■	■	■													
4	Bab III									■	■	■									
5	Pengumpulan Data													■	■	■					
6	Pengolahan Data																	■	■	■	
7	Bab IV																	■	■	■	
8	Bab V																				■
9	Penyempurnaan Skripsi																				■

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian